

Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Petani di Kabupaten Maros

Analysis of Village Fund Management and Empowerment of Farming Communities in Maros Regency

A. Musfirah^{1*}, Sobirin², Satria Mandala Putra³

*Email: amusfirah452@gmail.com

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Perjuangan Republik Indonesia

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sawerigading, Makassar

²Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Pepabri, Makassar

Diterima: 15 Oktober 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek penting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program untuk mengsejahtarkan masyarakat di semua wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, kuesioner, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pengembangan pelaksanaan penggunaan dana desa dan pemberdayaan Petani model di kembangkan berdasarkan peningkatan pengetahuan mengenai dana desa yang dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Tompobulu. Peningkatan pengetahuan akan memotivasi masyarakat Desa Tompobulu untuk aktif dan konsisten dalam setiap program dana desa. Peningkatan kualitas perencanaan dalam menyusun program dan rencana anggaran program dana desa dengan mempertimbangkan karakteristik sosial petani yang ada di Desa Tompobulu didampingi oleh tenaga ahli. Peningkatan pengetahuan terhadap program-program yang didanai dana desa akan meningkatkan kepedulian masyarakat Desa Tompobulu untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa. Model pengembangan pelaksanaan penggunaan dana desa ini dapat dijadikan referensi bagi upaya peningkatan efisiensi dan daya guna pemanfaatan dana desa pada daerah-daerah yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Desa Tompobulu Desa dengan ciri sumber penghidupannya dominan dari sektor pertanian yang ekonominya relatif belum berkembang.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Petani.

ABSTRACT

Village Fund Allocation is an important aspect of a village to carry out programs to improve the welfare of the community in all its areas. It is believed that the village government is more able to see the priority needs of the community than the district government which actually has a wider and more complex scope of problems. The aim of this research is to determine the management of village funds towards increasing village resource development. This research uses field research with quantitative descriptive research methods, the methods used in this research are: observation, questionnaires, interviews, and documentation. The results showed that the development model for implementing the use of village funds and the farmer empowerment model was developed based on increasing knowledge about village funds which was carried out by outreach to the people of Tompobulu Village. Increased knowledge will motivate the people of Tompobulu Village to be active and consistent in every village fund program. Improving the quality of planning in preparing programs and budget plans for village fund programs by taking into account the social

characteristics of farmers in Tompobulu Village accompanied by experts. Increasing knowledge of programs funded by village funds will increase the awareness of the people of Tompobulu Village to participate in and supervise the implementation of village fund programs. an area that has characteristics similar to Tompobulu Village A village with the characteristics of a dominant source of livelihood from the agricultural sector whose economy is relatively underdeveloped.

Keywords: Village Funds, Village Development, Farmer empowerment, Youtube



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions). Pendelegasian pengeluaran (expenditure assignment) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (revenue assignment) (Kaho, 2010). Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja (expenditure) bukan dari sisi pendapatan (revenue) (Fatoni, 2020).

Desentralisasi fiskal merupakan bentuk kebijakan yang dapat diambil dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan. Dalam kajian di beberapa negara, peningkatan pendapatan mempunyai hubungan positif dengan desentralisasi fiskal (Bodman,

2011). Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Saputra, 2013).

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk pemenuhan aspirasi daerah sekaitan dengan penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, menciptakan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, mengikutkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah, memperkecil ketimpangan antar daerah, serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Nurhemi dan Suryani, 2015). Otonomi daerah tidak mungkin berhasil apabila tidak didukung sepenuhnya oleh politik fiskal melalui transfer fiskal ke daerah (desentralisasi fiskal) untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah tersebut.

Salah satu bentuk kebijakan yang merupakan bentuk dari desentralisasi

fiskal adalah alokasi dana desa. Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengelola dana desa yang bertujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Menurut Khoiriah & Meylina (2018), pemerintah pusat telah membuat regulasi yang signifikan terkait pengelolaan dana desa sampai pada tingkat pengawasan dana desa. Regulasi yang diciptakan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik.

Alokasi dana desa mempunyai kemampuan yang kuat sebagai alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa yang tepat sasaran bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini tergantung dengan pelaku kebijakan untuk mengakomodir tentang bagaimana cara agar pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara optimal (Darmi & Mujtahid, 2021).

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, pengembangan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Aziz (2016)

memberikan penjelasan bahwa, pengelolaan dan pelaksanaan dana desa yang diberikan kepada desa dirasa belum efektif karena kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah desa belum memadai serta keterlibatan masyarakat yang belum aktif dalam pengelolaan dan pengawasan. Berdasarkan data BPS (2020), masyarakat di desa cenderung melakukan tindakan korupsi dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan. Masyarakat desa yang memiliki pendidikan lebih rendah lebih menerima tindakan korupsi dibandingkan masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi.

Dana desa merupakan dana yang dianggarkan pemerintah setiap tahun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 dan pasal 3 PP No 60 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang membahas mengenai efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa maka dari itu pemerintah merancang

keputusan bersama SKB 4 menteri yang memuat penguatan peran dan sinergi antara kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, penguatan supervise kepada pemda kabupaten/kota dan desa. Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana di transfer secara bertahap.

Melalui kebijakan refocusing penggunaan Dana Desa tahun 2021 pemerintah menargetkan tiga fokus utama, yaitu Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah menetapkan beberapa program kebijakan yang bisa membantu masyarakat untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak adanya pandemic Corona Virus disease (Covid-19). Salah satu Program yang di tetapkan pemerintah yaitu pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa sebanyak 10 juta keluarga penerima.

Berdasarkan peraturan menteri desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 7 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diantaranya terkait penyediaan

bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-Dana Desa). selain itu, kebijakan mengenai efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (Pasal 5 ayat (2) PP No 60 Tahun 2014).

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros memiliki 31 (tiga puluh satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah, 14 Kecamatan dan 23 Kelurahan serta 80 Desa dan 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dan Dinas (LPPD Kabupaten Maros, 2021).

Masyarakat pedesaan, berharap melihat pemerintahan desa yang bebas korupsi dan birokrasi yang efisien, menghadapi tantangan serius akibat penyalahgunaan Dana Desa. Kendala ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan anggaran, terbatasnya akses informasi anggaran desa, dan minimnya pengetahuan pejabat desa dalam mengelola dana. Kasus korupsi di Desa Bonto Manurung dan Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu,

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang melibatkan kepala desa dan pejabat desa, menggambarkan tantangan ini. Di sini, korupsi Dana Desa menyebabkan kerugian signifikan, dengan kepala desa dan suaminya ditangkap karena dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (Media Duta Online, 2021)

Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaan urusan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan tersebut berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut: (1) Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan dana desa, (2) Perlunya dilakukan evaluasi atas pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan. (3) Belum optimalnya perhatian dan pembinaan terhadap masyarakat desa khususnya masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan. (LPPD Kabupaten Maros, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan dana desa yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga pemanfaatan dana pembangunan tidak efisien sehingga kurang berperan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya

hambatan yang melekat pada desa tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mendesain pengembangan model pelaksanaan pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan. Pengelolaan yang baik akan mengoptimalkan manfaat dana desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi praktik-praktik korupsi. Kehadiran penelitian ini mendesak, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa..

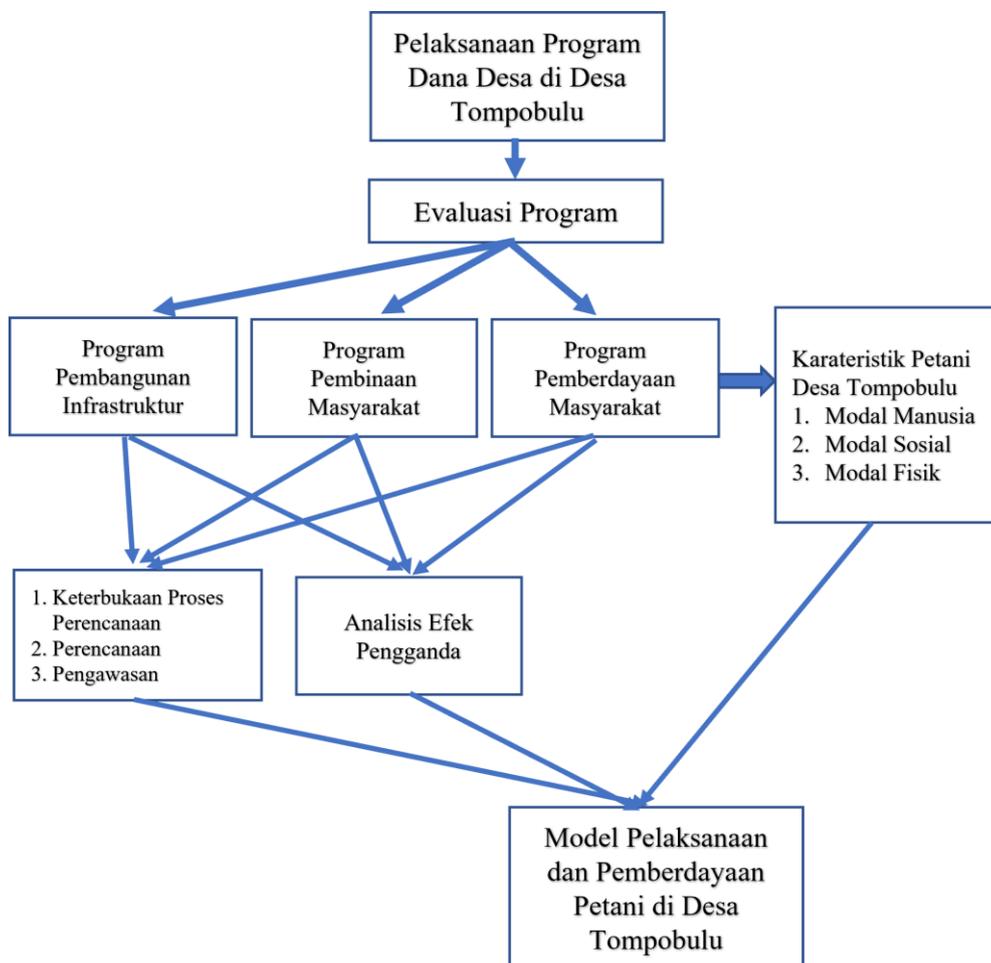
B. METODE PENELITIAN

1. Lingkup dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive (sengaja). Penelitian dilaksanakan di kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Pemilihan kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian karena kecamatan

Tompobulu merupakan salah satu kecamatan di kabupaten maros karena di kecamatan tompobulu pada tahun 2022, terdapat salah satu desa yang anggarannya paling tinggi adalah desa Tompobulu kecamatan Tompobulu yang mencapai Rp2,6 Miliar. Kegiatan penelitian dilakukan melalui wawancara terhadap responden dan kuesioner. Kegiatan

dilaksanakan selama 6 bulan. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan penggunaan dana desa dari tahun 2021-2022. Topik kajian difokuskan pada pembahasan dampak pemberian dana desa yang dilihat dari pengaruh ekonomi wilayah, pelaksanaan pengelolaan dana desa, dan pemberdayaan petani di Kabupaten Maros.



Gambar 1. Cara Pengumpulan Data

2. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan pengisian

kuesioner. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa PDTT).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu accidental sampling. Metode tersebut dipilih karena keterbatasan waktu serta kesibukan masyarakat petani yang bekerja dari pagi sampai menjelang malam.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif dengan menggunakan nilai multiplier effect. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa menggunakan Structural Equation Modeling berbasis varians yaitu Partial Least Square (PLS) diolah dengan software SMARTPLS3. PLS digunakan karena memiliki kelebihan pada jumlah sampel yang kecil, tidak mensyaratkan data terdistribusi normal dan menggunakan model prediksi yang bertujuan untuk mengembangkan teori (Abdillah et al., 2020). Model yang digunakan dalam menganalisis proses pelaksanaan pengelolaandana desa terdiri dari variable proses perencanaan yang dapat direfleksikan oleh keterbukaan proses perencanaan (PP1) dan penyusunan perencanaan program (PP2). Variabel pengawasan yang direfleksikan oleh kepemimpinan kepala desa (P1) dan kemampuan manajemen (P2). Variabel transparansi yang direfleksikan oleh

laporan pertanggungjawaban (T1) dan keterbukaan akses informasi terhadap laporan pertanggungjawaban (T2). Variabel evaluasi didefinisikan oleh hasil program dan program prioritas.

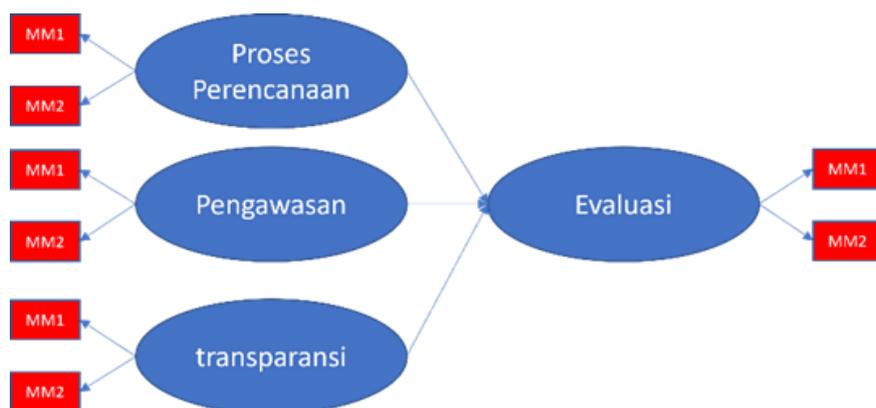
Penelitian ini menggunakan model refleksi, pengujian validitas dapat dilihat dari nilai outer loading dari setiap indikator. Jika nilai skor loading indicator $\leq 0,5$ maka indicator harus dihapus dari variabel latennya atau modelnya karena indicator tidak termuat (load) ke model yang mewakilinya. Jika nilai loading 0,5-0,7 maka skor loading masih dapat diterima sebagai indicator yang merefleksikan konstruksinya (Abdillah et al., 2020). Pada penelitian ini menggunakan nilai composite reliability. Variabel laten atau model dikatakan reliabel jika memiliki nilai composite reliability $> 0,7$ (Abdillah et al., 2020).

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel respon dijelaskan oleh variabel prediktor. Koefisien yang digunakan di dalam partial least square memiliki beberapa kriteria atau tingkatan. Nilai koefisien determinasi pada partial least square menurut Chin (2010), jika nilai koefisien determinasi 0,19 dikatakan lemah, 0,33 dikatakan moderat, dan 0,67 dikatakan kuat.

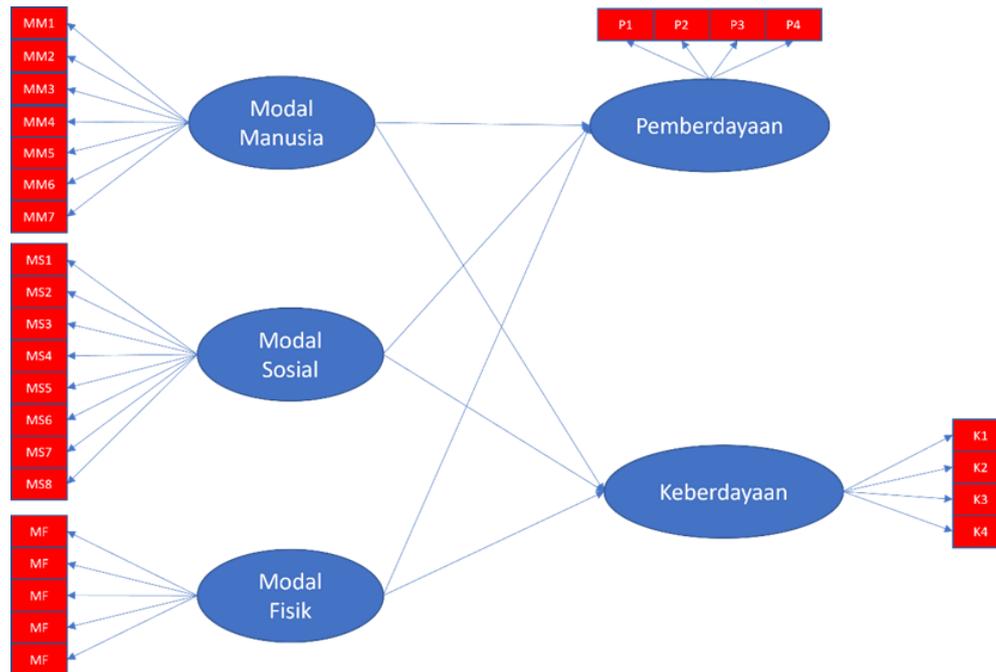
Sedangkan size F^2 merupakan nilai untuk menunjukkan tingkat pengaruh variabel laten endogen terhadap variabel laten eksogen. F^2 memiliki beberapa nilai kriteria pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogennya, yaitu 0,02 yang menunjukkan variabel eksogennya berpengaruh lemah, 0,15 yang menunjukkan variabel eksogennya berpengaruh moderat, dan 0,35 yang menunjukkan variabel eksogennya berpengaruh kuat (Chin 2010).

Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa di daerah perbatasan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis varians yaitu Partial Least Square (PLS) diolah dengan software SMARTPLS3. PLS digunakan karena memiliki kelebihan pada jumlah sampel yang kecil, tidak mensyaratkan

data terdistribusi normal dan menggunakan model prediksi yang bertujuan untuk mengembangkan teori (Abdillah et al., 2020). Model yang digunakan dalam menganalisis proses pelaksanaan pengelolaan dana desa terdiri dari variabel proses perencanaan yang dapat direfleksikan oleh keterbukaan proses perencanaan (PP1) dan penyusunan perencanaan program (PP2). Variabel pengawasan yang direfleksikan oleh kepemimpinan kepala desa (P1) dan kemampuan manajemen (P2). Variabel transparansi yang direfleksikan oleh laporan pertanggungjawaban (T1) dan keterbukaan akses informasi terhadap laporan pertanggungjawaban (T2). Variabel evaluasi didefinisikan oleh hasil program dan program prioritas (Gambar 2).



Gambar 2. Model analisis pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tompobulu



Gambar 3. Model analisis pemberdayaan petani melalui pemanfaatan dana desa di Desa Tompobulu

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Demografi Responden Petani Perbatasan Desa Tompobulu

Karakteristik demografi responden di Desa Tompobulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah lama

pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusaha tani, dan luas lahan. Karakteristik demografi yang menjadi responden dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik demografi responden petani Desa Tompobulu

Karakteristik demografi	Tingkatan	Jumlah Responden	Persentase
Lama pendidikan (Tahun)	6≤	53	70.67
	7-12	22	29.33
Tanggungan Keluarga (Jiwa)	4≤	58	77.33
	≥5	17	22.67
	10-20	22	29.33
	21-30	28	37.33
Pengalaman berusaha tani (tahun)	31-40	17	22.67
	41-50	5	6.67
	≥51	2	2.67
	Luas Lahan (Are)	0-50	40
51-100		32	42.67
101-150		2	2.67
151-200		1	1.33

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1, pendidikan yang dimiliki oleh mayoritas kepala keluarga yang menjadi responden masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas kepala keluarga yang pendidikannya hanya sampai tingkat sekolah dasar. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemampuan responden dalam mencapai kinerja yang optimal. Tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan manajemen dalam mengelola sesuatu pekerjaan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Wirawan et al., (2019) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan menunjang kinerja karyawan. Mayoritas responden memiliki tanggungan keluarga di bawah empat orang. Semakin besar tanggungan keluarga maka berdampak pada semakin besarnya kebutuhan rumah tangga petani. Tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor produksi pada usaha tani yang menjadi sumber tenaga kerja. Pertanian di Kabupaten Maros masih banyak menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kono dan Sipayung (2020), bahwa tenaga kerja yang digunakan petani di Desa Tompobulu Kabupaten Maros merupakan tenaga kerja dalam keluarga yang upah

tenaga kerjanya tidak dapat dihitung karena menjadi bagian dari biaya kehidupan petani sehari-hari. Pengalaman dalam bekerja memengaruhi pengetahuan terhadap alur kerja sehingga mampu membuat keputusan sendiri dan mampu mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Tingkat pengalaman yang tinggi juga dapat berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mengadopsi teknologi ataupun mengembangkan kreativitasnya. Masyarakat yang memiliki pengalaman yang tinggi biasanya sudah merasa paling tahu mengenai pekerjaannya dan susah untuk mendengarkan pendapat dari orang lain. Hal ini sesuai dengan Neonbota dan Kune (2016), bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan untuk meningkatkan produksi padi di Desa Tomponulu Kabupaten Maros. Kepala keluarga di Desa Tompobulu yang menjadi responden mayoritas berpengalaman dalam usaha taninya. Petani di Desa Tompobulu yang menjadi responden mayoritas merupakan petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 100 are. Lahan menjadi modal yang penting dan dapat memengaruhi usaha tani.

2. Multiplier Effect Dana Desa Pada Petani Desa Tompobulu Kabupaten Maros

Pertanian yang dilakukan di Desa Tompobulu masih bersifat tradisional, dilihat dari penggunaan alat yang masih sederhana dan masih belum berorientasi bisnis. Usaha pertanian mereka masih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Petani di Desa Tompobulu menanam lahannya dengan sistem polikultur. Tanaman yang paling

banyak diusahakan yaitu jagung, padi ladang, ubi, dan sebagian lahan digunakan untuk menanam jeruk keprok. Selain berusaha tani, masyarakat desa juga memiliki ternak yang pemeliharaannya masih dilepaskan di daerah hutan. Dalam hal pemeliharaan ternak, masyarakat desa ini belum berorientasi bisnis, tidak menghitung besar pengeluaran dan lama waktu pemeliharaan ternak (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Analisis Nilai Multiplier Effect Dana Desa di Desa Tompobulu

No.	Indikator	Nilai
1.	Rerata pendapatan petani tahun 2021	Rp18.987.500
2.	Rerata pendapatan petani tahun 2022	Rp29.895.000
3.	Rerata pengeluaran petani tahun 2021	Rp13.465.272
4.	Rerata pengeluaran petani tahun 2022	Rp23.869.000
5.	Marginal propensity to consume (MPC) $\Delta C/\Delta Y$	0,86
6.	Rerata proporsi pengeluaran modal petani (PSY)	0,35
7.	Pengaruh ekonomi wilayah (angka multiplier effect)	1,4239

Sumber: Data Diolah 2023

Penggunaan dana desa di Desa Tompobulu memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Penggunaan dana desa dari tahun 2021-2023 masih memprioritaskan pembangunan jalan baru dan pembangunan renovasi rumah penduduk yang tidak layak huni (Kementerian Desa PDT 2023). Program yang berhubungan dengan pengembangan usaha berbasis pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan petani belum menjadi prioritas pemerintah Desa Tompobulu. Angka multiplier effect sebesar pada Tabel 2 menunjukkan bahwa

setiap tambahan pendapatan yang berasal dari pertambahan investasi menyebabkan peningkatan pendapatan Desa Tompobulu sebesar 1,42 kali. Angka ini juga dapat diartikan bahwa setiap pembelanjaan yang dilakukan oleh petani di desa ini sebesar Rp1.500, akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp1.890 yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang mayoritas sebagai petani hortikultura. Peningkatan pendapatan petani di Desa Tompobulu belum maksimal disebabkan tingkat aktivitas ekonomi petani masih rendah. Modal yang dikeluarkan petani dalam

pengelolaan pertanian masih sangat rendah, yaitu rata-rata sebesar Rp950.000. Angka multiplier effect jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian Syahza (2011), yaitu sebesar 3.3 yang disebabkan oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Rendahnya pemanfaatan potensi sebagai daerah perbatasan dan minimnya pembangunan infrastruktur dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia petani di Desa Tompobulu. Rendahnya tingkat pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan menyebabkan tidak terciptanya kreativitas masyarakat yang berdampak pada rendahnya produktivitas serta memengaruhi pendapatan petani di Desa Tompobulu. Hal tersebut sejalan dengan yang hasil penelitian Yanutya (2013) bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan Tabel 1, pengalaman usaha tani yang dimiliki oleh petani di Desa Tompobulu rata-rata di atas 10 tahun. Petani yang memiliki pengalaman cenderung memahami alur kerja dan mampu membuat keputusan sendiri untuk usaha taninya. Petani yang telah berpengalaman akan lebih sulit untuk menerima perubahan ataupun inovasi karena menganggap pengalaman yang ada

selama ini membuat mereka merasa mampu berusaha tani sehingga adanya perubahan membuat mereka tidak akan mengambil resiko terhadap kehidupannya. Petani juga bertindak berdasarkan yang dialami dan merasa bahwa setiap tindakan mereka sudah benar tanpa mengetahui alasan melakukan tindakan yang mereka lakukan. Hal ini dapat menyebabkan tidak adanya ketertarikan pemanfaatan potensi dari pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh dana desa. Selan dan Hutapea (2019) mengemukakan bahwa pengalaman tidak memengaruhi curahan jam kerja pada curahan jam kerja wanita tani di Desa Tompobulu Kabupaten Maros. Petani tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kemampuan manajemen kerja.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tompobulu

Pengukuran convergent validity bertujuan untuk mengetahui hubungan validitas antara indikator dengan variabel latennya. Convergent validity dapat diketahui dengan melihat nilai outer loading. Indikator dikatakan baik apabila nilai outer loading $\geq 0,7$. Nilai outer loading dari masing-masing indikator setelah semua indikator yang tidak valid dihilangkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Outer Loading Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tompobulu

Variabel	Lambang Indikator	Indikator	Outer loading	Keterangan
Evaluasi dana desa	E1	Hasil program	0,935	Valid
	E2	Program prioritas	0,949	Valid
Pengawasan	P1	Kepemimpinan kepala desa	0,587	Valid
	P2	Kemampuan manajemen	0,946	Valid
Proses perencanaan	PP1	Keterbukaan proses perencanaan	0,956	Valid
	PP2	Keterbukaan proses perencanaan	0,957	Valid
Transparansi	T1	Laporan pertanggungjawaban	1,000	Valid

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 3, nilai outer loading indikator pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tompobulu semua menunjukkan $\geq 0,5$. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang disusun merefleksikan variabel latennya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebuah instrument pengukuran/indikator pengelolaan dana desa Desa Tompobulu mengukur secara valid dalam model yang digunakan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Abdillah et al., (2020) bahwa indikator-indikator yang merefleksikan variabel latennya dinyatakan valid jika memiliki nilai $> 0,5$.

Composite reliability bertujuan untuk mengukur nilai realibilitas setiap indikator dari variabel. Nilai composite reliability dinyatakan baik jika memiliki nilai $\geq 0,7$. Nilai composite realibiility pelaksanaan pengelolaan dana desa di

Desa Tompobulu apat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, semua variabel pelaksanaan pengelolaan dana desa memiliki nilai composite realibiility $\geq 0,7$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah konsisten dan stabil sebagai instrumen dan alat ukur model pelaksanaan pengelolaan dana desa Desa Manusasi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdillah et al. (2020), bahwa nilai composite realibility harus $> 0,7$.

Tabel 4. Nilai composite realibility pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tompobulu

Variabel	Composite realibility	Keterangan
Proses perencanaan	0,937	Reliable
Pengawasan	0,735	Reliable
Transparansi	0,950	Reliable
Evaluasi dana desa	1,000	Reliable

Berdasarkan Tabel 5, model menunjukkan variabilitas variabel pelaksanaan pengelolaan dana desa di eksogen memengaruhi variabel endogen Desa Tompobulu memiliki koefisien sebesar 74,7%. Nilai f^2 yang dimiliki determinasi (R^2) sebesar 0,747 yang variabel.

Tabel 5. Hasil Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tompobulu

Path coefficients	Original sample	Standar deviasi	T-statistics	P values
Pengawasan→Ev	0,234	0,205	1,098	0,267
Perencanaan→E	0,557	0,223	2,189	0,031a
Transparansi→E	0,245	0,219	0,976	0,336
R-Square	0,865			
Q2	0,709			
f^2	Pengawasan-Evaluasi	0,080		
	Perencanaan-Evaluasi	0,545		
	Transparansi-Evaluasi	0,046		

Keterangan: a signifikan pada $\alpha = 0,05$

Perencanaan berpengaruh kuat terhadap variabel evaluasi. Variabel pengawasan dan transparansi berpengaruh lemah terhadap evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik merupakan aspek yang desa di Desa Tompobulu. Keterbukaan informasi dalam proses perencanaan berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini juga berlaku di Desa Tompobulu. Proses perencanaan yang diketahui oleh masyarakat, membuat masyarakat merasa mampu mengawasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Di samping itu, masyarakat memiliki harapan terhadap program tersebut sebagai salah satu solusi yang dibutuhkan pada daerahnya. Thohari et al., (2017), keterbukaan serta transparansi data dan

proses meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah jika dibandingkan tanpa adanya keterbukaan pada setiap proses.

Sumber daya manusia merupakan salah satu kelemahan masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat desa di luar Pulau Jawa. Terpusatnya pemerintahan dan ekonomi di Pulau Jawa membuat masyarakat di luar Pulau Jawa menjadi sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat di Pulau Jawa.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan tingkat pengalaman yang tinggi mengenai sistem pertanian tradisional mengakibatkan masyarakat cenderung tidak kreatif dan susah untuk berinovasi. Hal ini dikarenakan

masyarakat sudah merasa cukup puas terhadap apa yang mereka hasilkan. Keterbatasan masyarakat dalam menyusun perencanaan menjadi salah satu kendala suatu program yang tidak bisa dijalankan. Lokasi Desa Tompobulu yang berada di perbukitan dan sulitnya akses internet menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Widiasih dan Suminar (2015) menyatakan bahwa mutu perencanaan berpengaruh terhadap mutu pelaksanaan program dan keduanya berpengaruh terhadap mutu hasil program rencana akan menghasilkan perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Tompobulu. Keterbukaan informasi dapat meningkatkan harapan masyarakat akan tersedianya infrastruktur dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peningkatan mutu perencanaan akan meningkatkan hasil dari pengelolaan dana desa menjadi lebih baik. Keterbukaan

proses yang menciptakan rasa memiliki dari masyarakat desa akan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Tompobulu dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

4. Pemberdayaan Petani melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tompobulu

Convergent validity bertujuan untuk mengetahui validitas indikator-indikator dengan variabel laten. Tabel 6 menyajikan nilai outer loading indikator pemberdayaan petani Desa Manusasi setelah indikator yang tidak valid dihilangkan. Berdasarkan Tabel 6, indikator pemberdayaan petani melalui pemanfaatan dana desa memiliki nilai outer loading $\geq 0,5$. Semua indikator pemberdayaan petani melalui pemanfaatan dana desa tergolong valid dalam membentuk modelnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdillah et al. (2020), bahwa indikator memiliki loading $> 0,5$ valid untuk merefleksikan variabel latennya.

Tabel 6. Nilai Outer Loading Indikator Pemberdayaan Petani Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tompobulu

Variabel	Lambang indikator	Indikator	Outer loading	Keterangan
Modal manusia	MM3	Pengetahuan	0,714	Valid
	MM4	Motivasi	0,867	Valid
Modal sosial	MS1	Disiplin	0,855	Valid
	MS4	Komitmen	0,835	Valid
	MS6	Kemandirian	0,867	Valid
	MS7	Kontrol sosial	0,759	Valid

Modal fisik	MF5	Alat komunikasi	1,000	Valid
Pemberdayaan	P2	Informasi pembiayaan	0,865	Valid
	P3	Teknis	0,872	Valid
	P4	Tingkat kesadaran	0,756	Valid
	K1	Kemudahan akses pembiayaan	0,747	Valid
Keberdayaan	K4	Peningkatan kemampuan teknis	0,868	Valid

Sumber: Diolah dari Data Primer (2023)

Composite realibility bertujuan untuk mengetahui realibilitas variabel. Nilai composite realibility pemberdayaan petani di Desa Tompobulu dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 7, nilai composite realibility variabel pemberdayaan petani di Desa Tompobulu $\geq 0,7$. Variabel pemberdayaan petani Desa Tompobulu melalui pemanfaatan dana desa stabil dan konsisten sebagai alat ukur/instrumen pemberdayaan petani melalui pemanfaatan dana desa (Abdillah et al., 2020).

Tabel 7. Nilai Composite Realibility Variabel Pemberdayaan Petani Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tompobulu

Variabel	Composite reallibity	Keterangan
Modal manusia	0,745	Reliable
Modal sosial	0,865	Reliable
Modal fisik	1,000	Reliable
Pemberdayaan	0,875	Reliable
Keberdayaan	0,796	Reliable

Berdasarkan Tabel 8, nilai koefisien determinasi pada variabel pemberdayaan dan keberdayaan di Desa Tompobulu tergolong moderat. Variabilitas variabel eksogen pada variabel pemberdayaan sebesar 36,8%, sementara pada variabel keberdayaan sebesar 65,9%. Modal

manusia dan modal sosial terhadap pemberdayaan memiliki pengaruh yang lemah dilihat dari nilai f^2 . Modal fisik memiliki pengaruh yang moderat terhadap pemberdayaan.

Pemberdayaan berpengaruh kuat terhadap keberdayaan di Desa Tompobulu. Kemampuan mengakses informasi menjadi faktor penting untuk peningkatan kemampuan petani di Desa Manusasi. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh modal fisik terhadap pemberdayaan dan pemberdayaan terhadap keberdayaan. Indikator modal fisik yang direfleksikan pada penelitian ini yaitu alat komunikasi dan kemampuan menggunakan alat komunikasi. Alat komunikasi dan kemampuan mengaplikasi alat komunikasi merupakan hal yang penting pada era digital. Kemampuan menggunakan teknologi komunikasi memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Alat pengetahuan tentang peningkatan kemampuan teknis lainnya. Kemampuan mengakses internet.

Tabel 8. Hasil Analisis Pemberdayaan Petani Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tompobulu

Variabel	Original sample	Standar deviasi	T-statistics	P-values
MF-K	0,041	0,069	0,595	0,552
MF-P	0,335	0,098	3,431	0,001a
MM-K	0,062	0,118	0,525	0,600
MM-P	0,216	0,130	1,663	0,097b
P-K	0,744	0,080	9,332	0,000a
MS-K	-0,026	0,090	0,228	0,774
MS-P	0,177	0,118	1,491	0,137c
M-P-K	0,161	0,105	1,538	0,125c
S-P-K	0,131	0,092	1,430	0,153c
F-P-K	0,401	0,087	3,212	0,003a
R2		0,659		
P		0,368		
Q2	K	0,364		
P		0,207		
MM-P		0,055		
MS-P		0,029		
MF-P		0,155		
f2		0,008		
MS-K		0,003		
MF-K		0,005		
P-K		0,978		

Dan kemudahan berkomunikasi memengaruhi keputusan petani mengikuti program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh desa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mujiyana dan Elissa (2013) bahwa kecepatan pemrosesan informasi berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian masyarakat. Petani di Desa Tompobulu memiliki kelemahan dalam menggunakan teknologi komunikasi. Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap kemampuan petani Desa Tompobulu untuk mengakses informasi penting. Petani di Desa Tompobulu masih bergantung terhadap penjelasan oleh satu oknum yang mengakibatkan rentan terjadi disinformasi.

Pengetahuan mengenai program pemberdayaan yang dikelola melalui pemanfaatan dana desa merupakan hal yang penting bagi petani di Desa Tompobulu. Masalah pendidikan yang menjadi kelemahan petani dapat diatasi dengan memberikan pengetahuan mengenai program pemberdayaan yang dikelola melalui pemanfaatan dana desa. Pengetahuan mengenai program pemberdayaan tersebut akan menimbulkan minat petani untuk mengikuti program yang disediakan. Motivasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai tujuannya. Petani yang termotivasi pasti akan memiliki ketekunan dan harapan terhadap

perubahan. Program pemberdayaan yang dibiayai oleh dana desa akan dilihat sebagai peluang untuk menambah kemampuan bagi petani yang termotivasi. Pengetahuan ditambah motivasi tinggi sebagai salah satu modal bagi petani Desa Tompobulu untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat. Pajar dan Pustikaningsih (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan mengenai investasi dan motivasi melakukan investasi meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Disiplin merupakan salah satu modal penting bagi setiap orang untuk mencapai kesuksesannya masing-masing. Disiplin merupakan salah satu syarat mutlak meningkatkan kinerja. Hal ini juga berlaku bagi petani Desa Tompobulu. Disiplin dari setiap individu petani memengaruhi kinerja petani mengikuti program pemberdayaan petani yang dibiayai oleh dana desa. Disiplin berlatih dan belajar akan menambah pengetahuan mengenai informasi pembiayaan dan kemampuan teknis petani di Desa Tompobulu. Farhah et al., (2020) menyatakan bahwa disiplin kerja meningkatkan kinerja karyawan. Kelompok tani merupakan wadah petani untuk bekerja sama mengatasi kesulitan bersama. Sebagai wadah petani,

kelompok tani diharapkan aktif dalam melaksanakan kegiatan. Kelompok tani yang aktif melihat adanya pemberdayaan petani yang didanai oleh dana desa sebagai salah satu peluang untuk berkembang. Kelompok tani yang aktif diisi oleh petani yang berkomitmen dan mandiri. Seringkali dalam kelompok tani menciptakan kesepakatan kelompok yang dapat dijadikan kontrol sosial bagi anggota kelompok tani itu tersendiri. Kelompok tani berperan penting untuk mendorong anggota kelompok mengikuti program pemberdayaan yang didanai oleh dana desa. Hadi et al., (2019) mengungkapkan bahwa kelompok tani memiliki peran penting untuk mendorong anggota kelompok dalam mengikuti penerapan budi daya padi organik di Kabupaten Jember.

5. Model Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Petani Desa Tompobulu

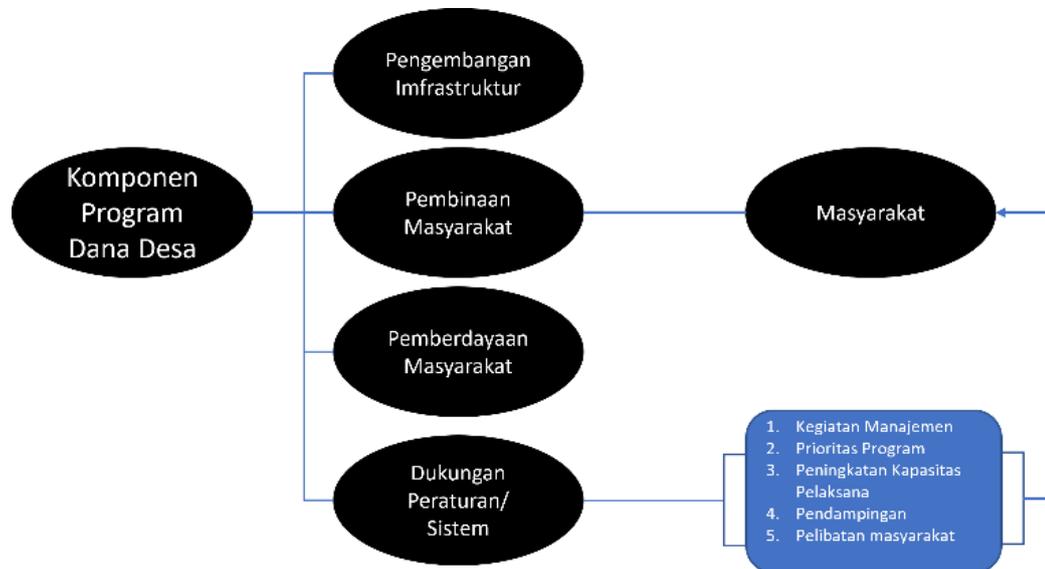
Masyarakat Desa Tompobulu memerlukan sosialisasi mengenai dana desa. Hal tersebut diperlukan agar dapat meningkatkan motivasi untuk berpartisipasi dalam program-program yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa. Kelemahan dalam berkomunikasi dan akses informasi merupakan kendala yang dapat diselesaikan melalui sosialisasi.

Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa Tompobulu dibantu dengan pendamping desa untuk meningkatkan efisiensi waktu. Penggunaan dana desa yang berasaskan musyawarah dimulai dari tingkat dusun yaitu melalui musyawarah dusun. Musyawarah dusun menghasilkan program-program yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat dusun tersebut. Program yang dihasilkan dalam musyawarah dusun adalah pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Program yang dihasilkan pada tingkat ini perlu divalidasi oleh tim yang ditunjuk oleh desa yang terdiri dari aparat desa, pendamping desa, penyuluh yang bertugas di desa tersebut, wakil dari kecamatan, wakil kabupaten, dan akademisi. Validasi program bertujuan untuk mengantisipasi adanya program “titipan” yang akan dibawa ke musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Selain itu, validasi program juga perlu dilakukan untuk melihat komitmen masyarakat berdasarkan modal fisik dan modal sosial yang dimiliki petani/masyarakat Desa Tompobulu untuk menjadi peserta dan pelaksana program. Program yang telah

divalidasi oleh tim validator akan dibawa ke dalam musrenbangdes. Dalam musrenbangdes dihasilkan program yang disepakati dan akan dilaksanakan. Dalam musrenbangdes diperlukan pendampingan oleh wakil kabupaten dan akademisi untuk menghindari adanya program “titipan”, meningkatkan kualitas perencanaan program ataupun ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat Desa Tompobulu. Program yang dihasilkan musrenbangdes menjadi program yang didanai dengan dana desa. Penyusunan rencana anggaran program dilaksanakan oleh aparat desa dan pendamping desa didampingi oleh penyuluh, wakil kecamatan, wakil kabupaten, dan akademisi. Hal ini bertujuan untuk membantu aparat desa dan pendamping desa untuk membuat anggaran sesuai dengan proporsi sehingga dapat mencegah adanya anggaran Lokakarya merupakan salah satu cara meningkatkan pengetahuan dan pengawasan markup terhadap program yang akan dilaksanakan. Rendahnya pendidikan masyarakat menjadi salah satu kendala dalam mengakses website desa untuk menganalisis rencana program dan laporan pertanggungjawaban program. Lokakarya dilaksanakan sebagai wadah sosialisasi program dan

pertanggungjawaban aparat Tompobulu Rekomendasi model desa/pelaksana terhadap masyarakat Desa pelaksanaan dana desa dapat dilihat pada



Gambar 4. Model Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa

Model di atas menunjukkan bahwa masyarakat menjadi pusat (central) dari sebuah program pembangunan. Hal ini sejalan dengan Teori Democratic Citizenship dari Denhardt and Denhardt (2003) yang memandang warga negara bukan sebagai entitas dan obyek dari system hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak dan kewajiban legal, akan tetapi harus menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan aktif untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingannya. Democratic Citizenship dapat kita wujudkan dalam program dana desa yang memang mempersyaratkan pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan kegiatan, mulai musyawarah

dusun sampai musyawarah desa, akan memberikan rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi kepada setiap warga desa, dan akan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi penting dan lembaga-lembaga publik akuntabel (Roberts, 2004).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan website pembelajaran yang terintegrasi dengan video berbasis youtube kita dapat melihat keaktifan siswa yang sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran menggunakan media tersebut. Dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan bahwa keaktifan dalam bertanya, menjawab pertanyaan dan

keikutsertaan dalam mengerjakan tugas kelompok mereka sangat antusias. Di media website pembelajaran ini terdapat beberapa fitur yang dapat diakses oleh pengguna atau peserta didik selama menggunakan website pembelajaran tersebut. Namun, dalam penggunaan media website pembelajaran ini masih memiliki kendala di pengaksesan internet yang dimana masih sering terjadi kemacetan jaringan internet karena kurangnya alat untuk mengakses internet dan juga masih banyak peserta didik yang tidak memiliki alat komunikasi untuk mengakses internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah W, Hartono J, Usman B. 2020. Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varians dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Bodman, P. (2011). Fiscal decentralization and economic growth in the OECD. *Applied Economics*, 43(23), 3021-3035.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Daerah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara (ID): BPS Daerah Sulawesi Tenggara.
- Chin, W. W. (2009). How To Write Up And Report PLS Analyses. In *Handbook Of Partial Least Squares: Concepts, Methods And Applications* (pp. 655-690). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2021). Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), 195-205.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An approach to reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3-10.
- Farhah Umi, N., Warsito, C., Lur Rochman, K., & Wihuda, F. (2020). The Influence of Personal And Job Characteristics on Organizational Commitment and Employee Work Performance at State University. *Revista Espacios*, 41(23).
- Fatoni, A. (2020). Fiscal Decentralization Dilemma in Indonesia: Between Corruption Accountability and Probability at Local Levels. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(1), 103-112.
- Hadi, A. S., Khairi, A., Asri, C. P., Artha, B., & Sari, U. T. (2021). Peningkatan Pemahaman Siklus Hidup Produk dan Pemasaran Digital pada Kelompok Tani Ikan di Desa Donoharjo. *Abdimas Altruist: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 88-93.
- Kaho, Josef Riwu. (2010). Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku pintar dana desa. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20-29.
- Kono, M., & Sipayung, B. P. (2020). Analisis Harga Pokok Produksi Usahatani Bawang Putih Berdasarkan Luas Lahan Desa Fatuneno Kabupaten Timor Tengah Utara. *AGRIMOR*, 5(1), 8-12.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros Tahun 2021.
- Media Duta Online (2021). "Korupsi ADD Kepala Desa Bonto Manurung Suami Istri Ditangkap Kejaksaan Maros."

- Diakses pada 22 Desember 2023. Tersedia di <https://www.mediaduta.id/2021/12/korupsi-add-suami-istri-kepala-desa.html>
- Mujiyana, M., & Elissa, I. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada toko online. *J@ TI Undip: Jurnal Teknik Industri*, 8(3), 143-152.
- Neonbota, S. L., & Kune, S. J. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani padi sawah di Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur. *Agrimor*, 1(03), 32-35.
- Nurhemi & Suryani, G. (2015). Regional Financial Autonomy and The Economic Growth In Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, 18(2), 171-192.
- Pajar, R. C., & Pustikaningsih, A. (2017). Pengaruh motivasi investasi dan pengetahuan investasi terhadap minat investasi di pasar modal pada mahasiswa FE UNY. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Roberts, N. (2004). Public deliberation in an age of direct citizen participation. *The American review of public administration*, 34(4), 315-353.
- Saputra, B. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat (the Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth and Social Welfare). *Jurnal Borneo Administrator*, 9(1).
- Selan, M. F., & Hutapea, A. N. (2019). Analisis faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi curahan jam kerja wanita tani padi sawah di Desa Haekto Kabupaten Timor Tengah Utara. *AGRIMOR*, 4(4), 58-59.
- Syahza, A. (2011). Percepatan ekonomi pedesaan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 297-310.
- Thohari, A. H., Kurniawan, N. B., & Yustianto, P. (2017). Rekayasa sistem keterbukaan data pemerintah untuk mendukung transparansi dan partisipasi pemerintah daerah. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, 6(3), 243-251.
- Widiasih, E., & Suminar, T. (2015). Monitoring dan Evaluasi Program Pelatihan Batik Brebesan (Studi di Mitra Batik Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1).
- Wirawan, K. E., Bagia, I. W., & Susila, G. P. A. J. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 5(1), 60-67.
- Yanutya, P. A. T. (2013). Analisis pendapatan petani tebu di kecamatan Jupon kabupaten Blora. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).